

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah di kabupaten Cirebon, dengan nomor 85 tahun 2016 seri D84 tentang fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang salah satu fungsinya adalah pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kuwu. Secara keorganisasian DPMD dipimpin oleh kepala dinas dan dibantu oleh tiga bidang, yaitu pertama kepala bidang sosial budaya dan kelembagaan masyarakat, Kedua kepala bidang usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan, dan ketiga kepala bidang pemerintahan desa, dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPMD selama ini menggunakan dua cara yaitu pertama melalui pemberian pedoman atau aturan-aturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalam pedoman atau aturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kedua pengawasan dilaksanakan melalui pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kuwu dan perangkat desa sebagai mana diatur dalam pasal 115 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Aparatur desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat di dalam lingkungan desa. Contoh aparatur desa seperti kuwu, perangkat desa, BPD dan Rt/Rw. Adapun istilah kuwu berasal dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 1 ayat 7 yaitu kuwu adalah kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kuwu mempunyai salah satu tugas yaitu melakukan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Bedasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemerintahan desa di DPMD Kab.Cirebon, menyatakan bahwa saat ini kegiatan pengawasan terhadap

penyelenggara pemerintahan desa khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat ini dilaksanakan dengan cara mengeluarkan pedoman ataupun petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pemerintah desa, serta dengan cara pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kuwu. Kegiatan pengawasan tidak dilaksanakan secara langsung oleh kuwu yang bersangkutan terhadap proses pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa. Hal ini terjadi karena proses pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan secara langsung oleh kuwu tanpa pemberitahuan kepada DPMD maka terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kuwu terutama dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan aturannya. Sesuai data yang diperoleh pada dinas terdapat 64 desa dari 412 (dapat dilihat pada lampiran A tabel 1) desa yaitu 15% desa yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan seperti halnya yang dilakukan oleh kuwu Desa Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak mengangkat perangkat desa yang usianya lebih dari 45 tahun sehingga Camat menolak untuk merekomendasi, sementara kuwu Desa Gempol Kecamatan Gempol dan Desa Bojonggebang memberhentikan perangkat desa yang di duga melakukan tindakan indisipliner namun pemberhentiannya tidak mengikuti prosedur atau aturan sehingga di batalkan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN). Permasalahan tersebut selain akibat kurangnya pengawasan secara tidak langsung juga kurangnya pemahaman kuwu atau peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Bedasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka dibutuhkan suatu pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keaparaturan terhadap penyelenggara pemerintahan desa terutama pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian yang dilaksanakan oleh kuwu, di harapkan Sistem yang dibangun dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala bidang pemerintah desa terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
2. Terjadinya hambatan kuwu dalam menentukan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disebabkan kurangnya sosialisasi atau peraturan dan perundang-undangan terutama tentang cara pemberhentian perangkat desa yang mengakibatkan banyaknya kuwu yang melakukan pelanggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi manajemen keaparaturan pemerintah desa di kabupaten Cirebon.

Sedangkan tujuan yang ingin di capai dalam membangun sistem informasi manajemen keaparaturan pemerintah desa di kabupaten Cirebon:

- a. Membantu kepala bidang pemerintahan desa dalam pengawasan terutama dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- b. Membantu kuwu dalam menentukan Calon perangkat Desa yaitu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, untuk menghindari pembahasan yang keluar dari permasalahan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi proses pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat desa.
2. Pengolahan data:
 - a. Data yang digunakan adalah data aparatur pemerintah desa di kabupaten Cirebon, Data pengangkatan dan pemberhentian, SK

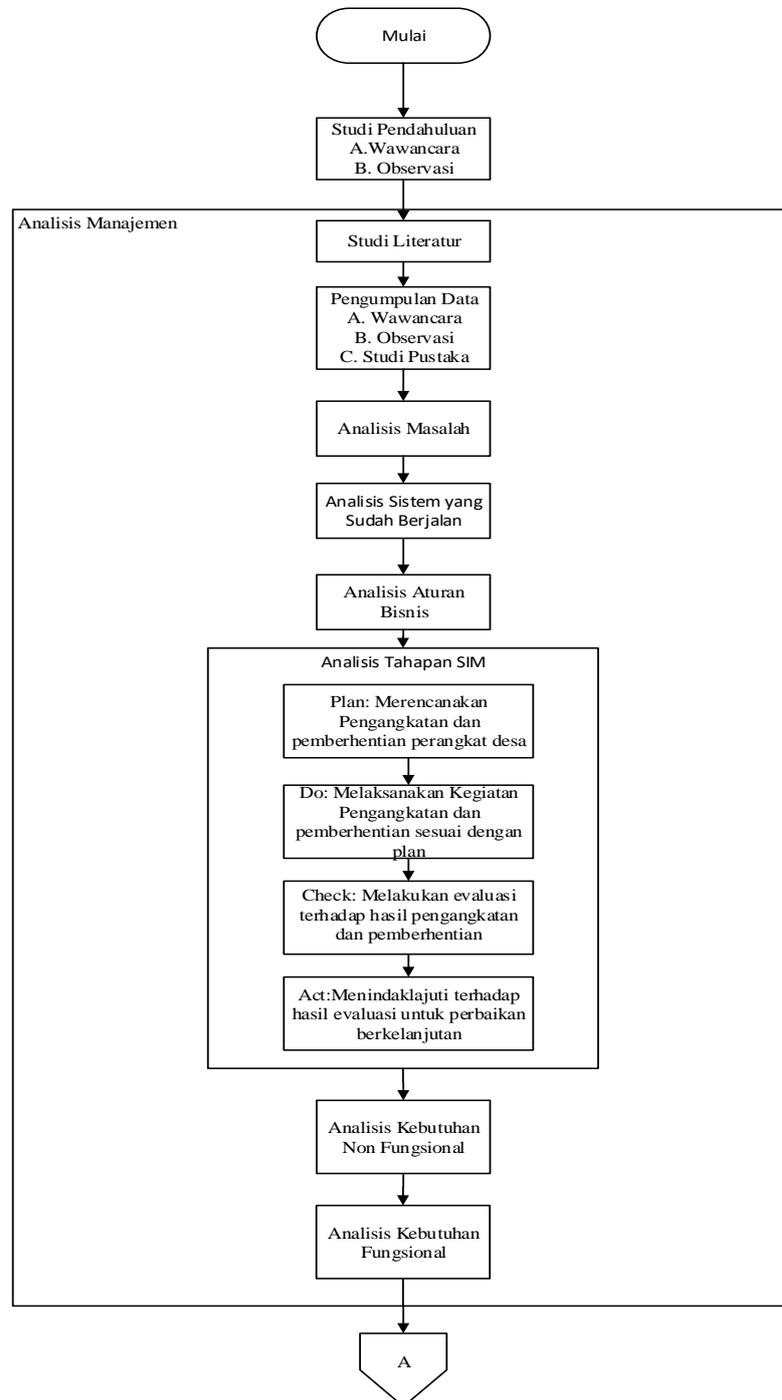
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, data kecamatan dan desa di kabupaten Cirebon.

- b. Proses pengolahan pada sistem ini meliputi proses pengolahan data aparatur pemerintah desa, data pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, SK pengangkatan dan pemberhentian, data kecamatan, desa.
- c. Output yang akan dihasilkan pada sistem ini adalah:
 - a. Info aparatur pemerintah desa kabupaten Cirebon.
 - b. Info pekerjaan aparatur pemerintah desa kabupaten Cirebon.
 - c. Info pendidikan aparatur pemerintah desa kabupaten Cirebon.
 - d. Info daftar SK kerja, pelanggaran pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
3. Model SIM yang digunakan adalah PDCA.
4. Metode AHP sebagai alat bantu mengambil keputusan untuk evaluasi kinerja perangkat desa yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan ketua bidang untuk pengangkatan dan pemberhentian.
5. Sistem yang dibuat adalah berbasis website.
6. Bahasa pemrograman menggunakan PHP.
DBMS yang di pakai adalah MySQL.

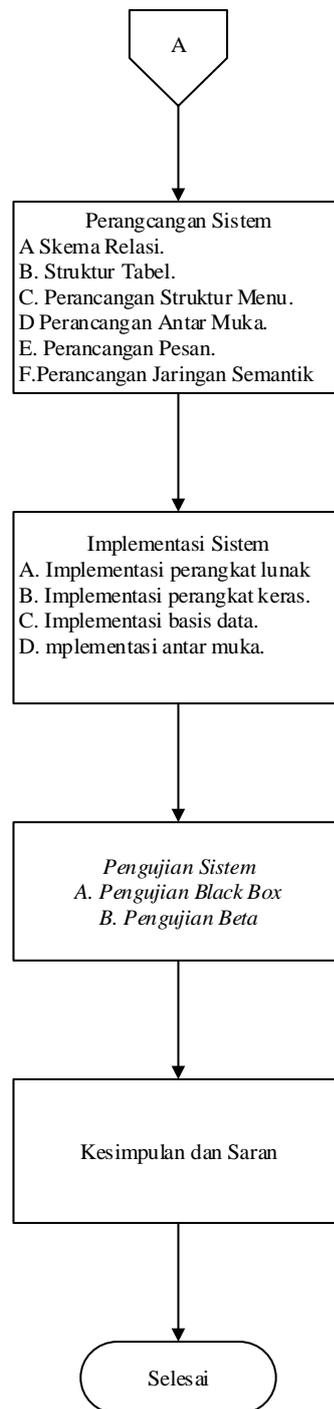
1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk pengembangan sebuah konsep yang sudah ada, selain itu penelitian yang dilakukan secara kualitatif pun akan membutuhkan data yang berupa penjelasan, catatan observasi, dokumen, dan juga angket atau wawancara.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 *Flowchart* Metodologi Penelitian



Gambar 1. 2 Flowchart Metodologi Penelitian

1.5.1 Studi Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan penelitian di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan melakukan:

- a. Wawancara dengan kepala bidang pemerintahan desa

b. Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan sistem yang berjalan di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa..

1.5.2 Studi Literatur

Tahap ini penulis mengumpulkan berbagai sumber yaitu dari buku maupun tugas akhir untuk dijadikan referensi dalam memperoleh teori-teori yang dibutuhkan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang mempunyai kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, adapun metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.
- b. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- c. Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari dokumen yang telah di jalankan oleh Kedinasan.

1.5.4 Analisis Sistem Yang Akan di Bangun.

Adapun metode pembangunan perangkat lunak yang akan digunakan adalah:

1. Analisis masalah

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap masalah yang ada pada dinas berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur.

2. Analisis sistem yang sedang berjalan

Pada tahap ini peneliti melakukan proses analisis sistem yang sedang berjalan mengenai proses.

3. Analisis aturan bisnis

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi dan pencatatan terhadap aturan – aturan baik yang tertulis maupun tidak.

4. Analisis metode yang digunakan

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan analisis metode yang akan digunakan dalam pembangunan sistem. Berikut adalah metode yang akan digunakan:

A. Siklus PDCA

Siklus PDCA terdiri dari 4 jenis tahapan, yaitu:

1. Planning

Dalam tahapan plan ini peneliti menganalisis hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pada tahap plan, mulai dari Merencanakan jumlah pengangkatan Perangkat desa yang dibutuhkan desa sesuai kekosongan jabatan.

2. Do

Tahapan ini peneliti menganalisis Melaksanakan pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan syarat jabatan dan menentukan nilai pada calon perangkat desa.

3. Check

Tahapan ini peneliti menganalisis hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pada proses check atau mengelola penempatan pengangkatan perangkat desayang sudah memenuhi persyaratan

4. Act

Tahapan ini peneliti menganalisis hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pada proses action yaitu tindak lanjut dari hasil evaluasi yang akan di terapkan pada sistem yang akan dibangun.

B. Metode AHP

Metode AHP digunakan sebagai alat bantu mengambil keputusan untuk evaluasi kinerja perangkat desa yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan ketua bidang untuk pengangkatan dan pemberhentian.

5. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan untuk pembangunan sistem meliputi:

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.

- b. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak.
- c. Analisis Pengguna.

6. Analisis Kebutuhan Fungsional

Pada tahapan ini peneliti menganalisis kebutuhan fungsional yang dibutuhkan untuk pembangunan sistem. Analisis kebutuhan fungsional meliputi:

- a. Diagram Konteks.
- b. BPMN
- c. *Data Flow Diagram* (DFD).
- d. Spesifikasi Proses.
- e. Kamus Data.

7. Perancangan Sistem

Tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem informasi yang akan dibangun. Perancangan sistem yang dilakukan antara lain:

- a. Skema Relasi.
- b. Struktur Tabel.
- c. Perancangan Struktur Menu.
- d. Perancangan Antar Muka.
- e. Perancangan Pesan.
- f. Perancangan Jaringan Semantik.

8. Implementasi Sistem

Pada tahapan ini peneliti mengimplementasikan hasil analisis dan perancangan ke dalam bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk membangun sistem berbasis web. Tahapa ini meliputi:

- a. Implementasi perangkat lunak
- b. Implementasi perangkat keras.
- c. Implementasi basis data.
- d. Implementasi antar muka.

9. Pengujian Sistem

Pada tahapan peneliti melakukan pengujian pada system yang telah dibangun meliputi:

- a. Pengujian *blackbox*.
- b. Pengujian *Beta*.

10. Kesimpulan dan Saran

Tahapan terakhir penelitian yang dilakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan terhadap sistem yang telah dibangun berdasarkan tujuan awal penelitian. Penelitian dianggap berhasil apabila kesimpulan yang dirumuskan sesuai dan memenuhi tujuan awal penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka, buku – buku ilmiah, jurnal – jurnal, ataupun dari sumber lain yang mendukung penelitian ini.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi analisis masalah dan metode yang tepat yang dapat digunakan pada persoalan tersebut dan merancang sistem yang mempunyai fungsionalitas yang sesuai dengan metode dan masalah yang ada.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi implementasi dari aplikasi yang dibangun kemudian diuji untuk melihat sejauh mana aplikasi mampu bekerja sesuai perancangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.